



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 November 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIS SAFRIANI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 1027234

II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 400.000.000 |
|---|------------|--------------------|
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m ² /45 m ² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 15.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 20.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 45.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 480.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 284.019.419 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 195.980.581 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIS SAFRIANI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 1027234

II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 400.000.000 |
|---|------------|--------------------|
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m ² /45 m ² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 15.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 32.990.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 57.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 504.990.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 277.560.781 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 227.429.219 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.